

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Sosial*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)
- A. Hamid S. Attamimi, *et.al, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992)
- Alex Carrol, *Constitutional and Administrative Law*. Fourth Edition, (Edinburg Gate: Pearson Education, 2007)
- Andyna Susiawati Achmad, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Deliberate Dishonesty Action*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023)
- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan: M. Isa Arief, (Jakarta: Intermedia, 1990)

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 1997)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2019)
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: PT Alumni, 2006)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Darwin Ginting, *et.al.*, *Pedoman Pembuatan Akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: PT Warta Mandiri Multimedia, 2023)
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018)
- Deassy J.A. Hehanussa dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Widina Bahkti Persada, 2023)
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Eduard Awang Maha Putra, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2024)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014)

- H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian; Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2012)
- H. Rosidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998)
- H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan; Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT) Atas Tanah (Pengaturan, Karakteristik dan Praktik)*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017)
- Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984)
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2022)
- Iwan Permadi, *Unifikasi dan Pluralisme Hukum Agraria*, (Malang: Penerbit Gunung Samudera, 2017)
- J. Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015)
- J.C.T. Simorangkir, *et.al, Kamus Hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)
- Lanny Kusumawati, *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat*, (Surabaya: Laros, 2011)
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020)

- M. Idris Ramulyo, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)
- Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- N.E. Algra, *et.al.*, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1983)
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris; Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, (Bandung: Penerbit Pusat Reka Cipta, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan ketujuh, (Jakarta: Kencana, 2005)
- _____, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010)
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018)
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003)
- Safri Nugraha, *et.al.*, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Salim H.S., *Hukum Kontrak; Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1996)
- Setiawan Rachmat, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 1995)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009)
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)
- Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT Perca, 2005)
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010)
- Syuryani, *et.al*, *Hukum Acara Perdata*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: IS Gravennage Vorkink van Hove, 1962)

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Jurnal

Amelia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah yang diperoleh Secara Pewarisan”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.81-85>

Andria Luhur Prakoso, “Surat Tanda Bukti Hak Waris dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo”, *PROSIDING The 2nd University Research Colloquium*, 2015.

Arie Lestario dan Erlina, “Sistem Pendaftaran Tanah yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia”, *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.1>

Avina Rismadewi dan Anak Agung Sri Utari, “Kekuatan Hukum dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan”, *Journal of Legal Studies*, Vol. 3, No. 3, Mei 2015.

Ayu Riskiana Dinaryanti, “Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan oleh Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 3, 2013.

Bambang Sukamto, Wiwin Tri Yuniawati, dan Riani Dwi Septasari, “Pembagian Warisan Berdasarkan Undang-Undang Warisan yang Berlaku di Indonesia Studi Keberadaan Warisan Pengganti (Plaatsvervulling)”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i2.4337>

- B. Wibowo Suliantoro, “Dinamika Arah Kepastian Hukum di Tengah Transformasi Sosial-Budaya dalam Perspektif Pemikiran Mazhab *Sociological Jurisprudence*”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 17, No. 1, 2007. DOI: <https://doi.org/10.22146/jf.23230>
- Christina Sri Murni, “Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juni 2020. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3904192>
- Clara Ivena Tampanguma, Elko L. Mamesah, dan Harly S. Muaja, “Kekuatan Hukum Pembuktian dalam Perjanjian Akta Di Bawah Tangan, *Lex Privatum* Vol. 9, No. 11, 2021.
- Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 ayat (2) K.U.H.Perdata”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018. DOI: <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725>
- Eka Puji Setiyarini, Abdul Rachmad Budiono, dan Titik Soeryati Soekesi, “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 1, No. 1, September 2014.
- Ferry Firdaus, “Diskresi Birokrasi”, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 7, No. 1, 2011. DOI: <https://doi.org/10.24258/jba.v7i1.137>
- Harly Stanly Muaja dan Marthen L. Lambonan, “Kajian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tanah”, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 1, 2011.
- Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, Februari 2009. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>

- Iwan Permadi, “Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol, 8, No. 1, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>
- Marsma Arif Widiyanto, “Dampak Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, Edisi 42, 2020. Jakarta: Biro Humas Settama Lemhannas Republik Indonesia
- Meray Hendrik Mezak, “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Law Review* Vol. 5, No. 3 Maret 2006.
- Mirna Sulistianingsih Dien, “Hak Waris Anak yang Lahir dari Hasil Inseminasi”, *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3, 2014.
- M. Yazid Fathoni, “Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.882>
- Ni Wayan Ari Susanti dan I Gusti Ayu Dike Widhyaastuti, “Pelaksanaan Asas “*Contradictoire Delimitatie*” dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Sevcara Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli”, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Petrik P.E. Kolinug, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 7, September 2017. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18099>
- Rionald Dimas, “Publikasi Pendaftaran Tanah di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum”, *Prosiding SERINA III 2021*, Vol. 1, No. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.16161>

Rofiqah Rahmi dan Sudjito, “Aspek Yuridis Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 9, No. 1, Februari 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v9i1.7868>

Sylvia Shasmita dan Andryawan, “Pembagian Harta Warisan Oleh Pewaris yang Tidak Menikah Kepada Keponakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i2.27826>

Yunanto, “Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019. DOI: <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5000>

Yuniar Kurniawaty, “Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk *Hukum* (*The Use of Discretion in the Formation of a Legal Product*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953)

Website/Internet

Arif Christiono Soebroto, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas”, https://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/WORKSHOP_Peraturan_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf, diakses pada 14 Maret 2024

Aziz T. Saliba, “Rebus sic Stantibus: A Comparative Survey”, eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal, Vol. 8, No. 3, September 2001, <https://www5.austlii.edu.au/au/journals/MurdochUeJILaw/2001/18.html>, diakses pada 12 April 2024

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>, diakses pada 12 April 2024

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, “Peralihan Hak Pewarisan”, <https://kot-jakbar.atrbpn.go.id/cari-layanan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, “Peralihan Hak Pewarisan”, <https://kot-jakpus.atrbpn.go.id/cari-layanan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, “Peralihan Hak Pewarisan”, <https://kot-jaksel.atrbpn.go.id/cari-layanan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, “Peralihan Hak Pewarisan”, <https://kot-jakut.atrbpn.go.id/cari-layanan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, “Peralihan Hak Pewarisan”,
<https://kot-tangerangselatan.atrbpn.go.id/cari-layanan>, diakses pada tanggal
3 Juni 2024

Kantor Pertanahan Kota Tangerang, “Peralihan Hak Pewarisan”, <https://kot-tangerang.atrbpn.go.id/cari-layanan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024

Kamus

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>

The Law Dictionary, Black’s Law Dictionary 2nd Ed.
<https://thelawdictionary.org/discretion/>

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ady Rustam Efendi, Koordinator Substansi Pemeliharaan Data Tanah dan Ruang, dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, tanggal 15 Mei 2024, pukul 10.56 WIB

Hasil wawancara dengan Aldani Alam, Staf Peralihan Hak Atas Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tanggal 29 April 2024, pukul 14.19 WIB

Hasil wawancara dengan Endang Jauhari, Koordinator Sub Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang, dan Pembinaan PPAT pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kota Tangerang, tanggal 8 Mei 2024, pukul 14.53 WIB

Hasil wawancara dengan Evita Nur Elisa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, tanggal 7 Mei 2024, pukul 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Haerna, Penata Pertanahan Pertama, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 16 Mei 2024, pukul 11.30 WIB

Hasil wawancara dengan Putra Hutomo, Notaris dan PPAT di Jakarta Selatan, secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*, tanggal 4 Mei 2024, pukul 17.25 WIB

Hasil wawancara dengan Rinto, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang, dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 3 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

Hasil wawancara dengan Stefanie Hartanto, Notaris dan PPAT di Kabupaten Tangerang, Kantor Notaris Stefanie Hartanto, tanggal 17 Mei 2024, pukul 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Suis Agung Wahono, Staf Subseksi Peralihan Hak atas Tanah, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 26 April 2024, pukul 09.00 WIB

Hasil wawancara dengan Suratmin, Plt. Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang, Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang, dan PPAT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, tanggal 8 Mei 2023, pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Wahyudi Risdianto, Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang, dan Pembinaan PPAT, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 30 Mei 2024, pukul 11.12 WIB